

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR DI KOTA CILEGON

THE IMPLEMENTATION OF PAID PLASTIC POLICY IN CILEGON CITY

(disubmit 10 Mei 2020, direvisi 10 Juni 2020, diterima 30 Juni 2020)

Annisa Aurellia Ismiandini¹, Revita Yuniar², M Dian Hikmawan^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl Raya Jakarta KM 04
Pakupatan Serang-Banten 42124, Indonesia.

*Corresponding Authors: dian.hikmawan@untirta.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon terhadap Plastik berbayar dengan UU Pemda No. 18 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah pada pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang dalam menjaga, mengontrol sampah dengan tindakan dan wawasan lingkungan agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Sampah yang menumpuk dan hanya dibiarkan di tanah lapang dekat pekarangan rumah warga yang hanya diselesaikan dengan pembakaran sampahnya, atau dengan cara dekomposisi. Penelitian ini akan melihat bagaimana efektifitas dan efisiensi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam meminalisir menumpuknya sampah plastik di Kota Cilegon dengan di terapkan sampah berbayar. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan plastik berbayar memiliki dampak baik bagi pengelolaan sampah dan berdampak positif bagi lingkungan.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Plastik Berbayar, Kota Cilegon.

ABSTRACT

The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. The rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved by burning the trash, or by decomposition. This research will look at how the effectiveness and efficiency of a policy implemented by the City Government of Cilegon in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.

Keywords: Plastic Waste, Paid Plastic Policy, Cilegon City

PENDAHULUAN

Sampah sudah diproduksi oleh makhluk hidup berabad-abad lamanya baik oleh manusia maupun hewan dan tumbuhan. Baik sampah organik maupun anorganik. Sampah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan adalah suatu hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kotoran yang dihasilkan oleh manusia bukan hanya berupa kotoran yang dapat dengan mudah terurai oleh alam sama halnya seperti kotoran hewan, tetapi manusia menghasilkan sampah yang tidak dengan mudah terurai oleh alam seperti plastik, sampah rumah tangga, limbah pabrik, dan sampah dengan bahan lainnya yang tidak dapat dengan mudah terurai di alam.

Kumpulan sampah yang tidak mudah terurai ini dihasilkan manusia dengan jumlah yang sangat besar setiap harinya yang jika dibiarkan akan menumpuk dan dapat berdampak bagi lingkungan yang juga dapat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Bumi yang terus dieksploitasi oleh jumlah sampah ini jika terus dibiarkan saja menjadi planet yang tidak layak huni sedangkan di semesta ini tidak ada planet lain seperti bumi bahkan hingga sekarangpun belum ditemukan planet yang dapat dihuni seperti di bumi.

Salah satu sampah yang sangat sulit diurai oleh alam adalah plastik yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah plastik. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang di dunia, menekan manusia untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah sesuatu. Data awal yang peneliti temukan mengenai perkembangan sampah plastik ditahun 2019, Indonesia merupakan wilayah penghasil sampah plastik terbesar kedua

setelah Cina, dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan Indonesia 1,29 jt, ton/ tahun.

Dengan jumlah volume sampah fantastis itu Indonesia perlu bergerak dengan benar guna menanggulangi sampah plastik yang ada. Pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia masih kesulitan dalam menangani permasalahan sampah plastik. Bukan hal yang mudah untuk mengatasi sampah plastik mengingat plastik sendiri memiliki sifat yang susah untuk di dekomposisi. Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Kota Cilegon. Salah satu Kota dari bagian di Indonesia yaitu Kota Cilegon yang bertepatan berada di ujung pulau jawa arah barat.

Ciri khas yang dimiliki oleh Kota Cilegon ialah dengan julukan Kota Baja. Hampir di semua penjuru Cilegon terdapat perusahaan-perusahaan besar baja. Kota Cilegon dengan luas 175.5 Km² yang memiliki 8 Kecamatan, 43 kelurahan, dan 295.738 jiwa. Cilegon ialah Kota kecil yang berada di ujung barat laut pulau jawa. Cilegon tidak memiliki TPA resmi dalam pembuangan sampah, selama ini dalam permasalahan pengangkutan sampah hanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atas swadaya masyarakat (Profil Kota Cilegon, 2015).

Pemerintah Kota Cilegon pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cilegon memiliki tugas salah satunya dalam hal pengambilan sampah-sampah yang ada di jalanan, trotar. Kesadaran masyarakat akan sampah memang kurang dari yang disampaikan di dalam modul profil Kota Cilegon. Dinas Kebersihan sempat membuat TPS namun tak lama beberapa bulan lalu terbakar dan belum diperbaiki hingga detik ini. Demikian masyarakat hanya tetap meneruskan

kebiasaannya dalam membuang sampah di lahan kosong sekitar lingkungan rumahnya, yang kemudian membakarnya.

Sampah yang dihasilkan Kota Cilegon sendiri berkisar 1.345,05 m² per harinya. Merupakan salah satu sasaran yang dimiliki Pemkot Cilegon yang akan merealisasikan terwujudnya lingkungan Kota yang bersih dan asri, yang akan berdampak pada pemerataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam agar lingkungan Kota Cilegon menjadi asri dan lestari. Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengeluarkan Perda dalam mengatur produksi limbah plastik. Pencemaran pada lingkungan adalah masalah bersama bukan masalah individu.

Pada pencemaran lingkungan ini harus ditangani cepat tanggap baik dengan pemerintah setempat atau masyarakat disekelilingnya. Hal-hal mengancam kesehatan akan terjadi apabila tidak ada kesadaran sejak dini dalam aksi tanggap pengurangan sampah anorganik tersebut. Kebijakan Pemerintah Daerah yang saat ini sudah diberlakukan oleh Kota Cilegon yaitu dengan mengenakan tarif pada setiap pemakaian plastik seharga Rp. 200,-/plastik. Melihat jumlah produksi sampah plastik Kota Cilegon sebesar 20% dari sampah umum.

Sebagaimana dalam program Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu "Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". Sejalan dengan UU Pemda No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang dalam menjaga, mengontrol sampah dengan tindakan dan wawasan lingkungan agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Berikut juga pada pasal 6 hingga pasal 10 yang dimana masing-

masing isi pasal tersebut menjelaskan pembagian wewenang dalam pengelolaan sampah mulai dari pusat hingga Kabupaten/Kota.

Sisi lain dari sampah yang sudah dijelaskan pada pasal diatas ialah, manusia dapat mendaur ulangnya untuk hal-hal yang jauh bermanfaat. Kota Cilegon beberapa masyarakatnya sudah sadar akan pencemaran sampah anorganik yang mereka lakukan dengan mengubah plastik-plastik tersebut menjadi BBM. Hal tersebut dibantu arahan oleh PT Chandra Asih. Masyarakat tergerak untuk membantu mengembangkan pemanfaatan limbah plastik tersebut yang notabennya adalah sampah yang sulit terurai. Mereka biasanya membakar 16 Ton hingga 20 Ton sampah plastik perharinya untuk dijadikan BBM.

Menurut Joseph (2006) sampah adalah satu hal yang berifat krusial jika tetap dibiarkan oleh masyarakat setempat dan pemerintah setempat. Tugas Pemerintah Kota beserta Dinas Kebersihan setempat memiliki tugas terhadap hal tersebut, namun memang yang seperti yang dikatakan oleh Joseph (2006) bahwa pelayanan mereka dalam mengatasi sampah ialah hal yang disepelekan sehingga sampah khususnya pada sampah plastik memiliki prioritas yang rendah, pelayanan yang tidak efisien dan tidak berkembang.

Hal yang menjadi permasalahan lainnya adalah pembiayaan dan ketidakdisiplinan petugas dalam melakukan tugas sebagaimana mestinya. Pembiayaan yang sangat besar hingga membuat pembengkakan dana serta mengakibatkannya kekurangan dana oprasional, dan hal yang paling penting adalah institusi yang berkualitas rendah dan acuh terhadap daerah setempat.

Seharusnya dalam hal pengangkutan sampah apapun dilakukan oleh pihak yang berwenang atas tugas dan kewajibannya, sebesar 60%-70% harus diangkat oleh petugas yang di mandatkan dalam pengambilan sampah yang ada di masyarakat seperti yang dikatakan oleh Damanhuri (2009).

Peraturan daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2003 mengenai ketertiban, kebersihan, keindahan wilayah Kota Cilegon dimana kewajiban pada pengelolaan sampah memang bukan hanya pada pemerintah setempat saja (Rahayuningsih, 2019). Keacuhan masyarakat terhadap lingkungan harus disadarkan, selain masyarakat juga sebagai pemilik usaha yang menghasilkan output sampah, khususnya pada plastik harus memiliki kesadaran penuh terhadap dampak dilingkungan sekitarnya.

Konsep yang dianut oleh Pemerintah Daerah yang diambil dari Kementrian Lingkungan Hidup dengan menerapkan 3R, yaitu: Reduce, Reuse, Recycle. Dengan konsep tersebut merupakan salah satu program yang diimplementasikan oleh pemda Cilegon diperuntuk untuk meminimalisir penumpukan sampah, namun hal tersebut seperti kurang efektif dan tidak membuat masyarakat Kota Cilegon sadar akan kebersihan lingkungannya.

Salah satu konsep atau upaya lainnya dengan mengajak masyarakat Kota Cilegon ikut program bank sampah, yang hingga saat ini masih berjalan namun terlihat sampah yang di angkut khususnya sampah plastik di Kota Cilegon masih belum berkurang. Oleh karena itu, kita ingin meneliti kesuksesan program yang diberlakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Pemerintahan Daerah.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Pada hakikatnya kebijakan merupakan kepentingan bersama yang dimana kebijakan dibuat untuk kepentingan bersama (Hikmawan, 2020), keuntungan bersama, dan masa depan Bersama. Maka dari itu penting jika kebijakan tersebut ditargetkan untuk keberhasilan Bersama dan berdampak secara keseluruhan. Setelah kebijakan melewati tahap-tahap yang seperti agenda setting, formulasi, dan legitimasi, maka tahap selanjutnya adalah implementasi (Widiyanto, Hikmawan, & Riswanda, 2019).

Implementasi yang dimaksud adalah setelah seluruh tahap sudah dilewati maka kebijakan tersebut siap untuk diimplementasikan atau dilaksanakan terhadap target atau yang dalam hal ini biasanya masyarakat sipil. implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn, (1975) dalam Leo Agustino (2006) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat termasuk sektor pemerintahannya, dan juga terhadap kelompok swasta yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditargetkan terhadap keputusan kebijakan (Hikmawan, 2017b).

Sehingga peneliti dapat mengambil inti sari dari teori ini yaitu penerapan kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok masyarakat tidak terkecuali pejabat yang termasuk pemerintahannya juga sektor swasta yang dimana tindakan ini didasari oleh ketetapan yang sudah ada guna tercapainya tujuan dari ketetapan tersebut yang nantinya tujuan ini juga akan berguna terhadap masyarakat dan Negara itu sendiri.

Tidak mudah kebijakan tersebut untuk berjalan dengan mulus karena kebijakan tersebut akan dihadapi oleh berbagai macam bentuk aspek yang nantinya akan mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut (Hikmawan, 2017b). Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan publik yaitu ada yang Menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2005) Implementasian dari suatu kebijakan akan terpengaruh pada dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of police*) dan lingkungan implementasi (*conteks of police*).

Cakupan yang dimaksud dari variabel isi kebijakan yaitu Pertama, bagaimana kebijakan itu akan mencakup sasaran dan target dari tiap kepentingan kelompok. Kedua, manfaat dan target untuk masing-masing kelompok. Ketiga, adanya suatu perubahan dari kebijakan tersebut. Keempat, program yang tepat. Kelima, memiliki keteraturan dan keterperincian terhadap implementasinya. Keenam, memiliki sumber daya yang cukup (Widiyanto et al., 2019).

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi: Pertama, besaran kekuasaan, kepentingan, serta strategi terhadap aktor yang terlibat pada penerapan kebijakan tersebut. Kedua, melihat rezim yang berkuasa dan melihat karakter dari institusi-institusi didalamnya. Ketiga, disiplin dan responsibility dari target atau sasaran kelompok.

Sedangkan menurut Weimer dan Vining, (1999) dalam Subarsono (2005) menegaskan ada tiga hal yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: a) pemikiran dari rancangan kebijakan; b) lingkungan dari cakupan kebijakan yang diterapkan; c) aktor yang memiliki karakteristik sehingga kebijakan akan berjalan lancar.

Plastik dan Jenisnya

Pada umumnya plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai. Menurut Waste Management Information (2004) komposisi dari plastik terdiri atas zat additive termasuk polymer. Yang dimana polymer ini terdiri dari ikatan kimia. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Plastik sendiri dikelompokkan menjadi thermoplastik dan thermosetting.

Thermoplastic adalah bahan yang mudah meleleh namun akan kembali pada bentuk semula saat dipanaskan pada suhu-suhu tertentu. Lain halnya dengan thermosetting yang merupakan bahan plastik yang dipanaskan untuk membentuk suatu benda atau barang, maka benda itu hanya bisa berbentuk seperti itu saja dengan kata lain benda dengan bahan thermosetting tidak bisa dipanaskan dan diubah bentuk menjadi bentuk lain. Sifat dari kedua bentuk macam plastik tersebut yang memungkinkan untuk didaur ulang adalah thermoplastic.

Jenis-jenis plastik yang ada dan dipakai sehari-hari yaitu PET (PETE) / polyethylene therephthalate. Plastik jenis ini memiliki sifat yang ringan murah, mudah, dan biasa digunakan untuk botol minuman soft drink. Adapun plastik jenis HDPE (High Density Polyethylene) memiliki bahan yang kuat, namun memiliki kekurangan yaitu: tidak kuat terhadap korosi. Dengan demikian penyebaran kimianya minim, biasanya dipergunakan untuk kemasan shampoo, deterjen, dan lainnya.

Dampak Plastik Terhadap Lingkungan

Selain dari rusaknya nilai estetika yaitu keindahan yang seharusnya dimiliki sungai, Kota, dan lain sebagainya harus tercemar oleh penumpukan sampah yang berlebih dan terbengkalai. Tidak hanya itu sampah juga berdampak pada kesehatan lingkungan seperti jika kita membakar sampah dengan jumlah sangat besar tanpa ada pengelolaan yang benar, maka hasil dari pembakaran sampah tersebut akan menghasilkan komponen-komponen berbahaya seperti karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO₂), dan sebagainya.

Bau yang dikeluarkan oleh sampah juga merupakan salah satu pencemaran udara karena menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, dapat mengusik aktivitas sehari-hari, terlebih lagi jika timbunan sampah berada didekar perairan seperti sungai hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Bahan thermosetting memiliki dampak yang paling parah dari seluruh jenis-jenis bahan plastik karena sifat yang tidak bisa terurainya.

Bahan tersebut berdampak pada rusaknya kualitas tanah, air tanah, hingga makhluk yang hidup di tanah karena akibat tercampur racun pada partikel plastik yang menguap sehingga dapat membunuh makhluk yang hidup di dalam tanah tersebut.

Kantong plastik juga akan mengganggu atau menutup aliran air yang masuk ke dalam tanah dan berdampak pada kesuburan tanah karena plastik akan menghalangi sirkulasi udara di bawah tanah. Dampak-dampak ini terjadi akibat konsumsi berlebihan pada plastik yang sampahnya tidak diatasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2011) metode deskriptif kualitatif

digunakan untuk meneliti objek-objek yang alamiah (berupa seperti melakukan suatu eksperimen), posisi peneliti ialah sebagai kunci terhadap data-data yang disusun secara gabungan yang bersifat induktif atau kualitatif. Metode ini lebih kepada penekanan makna dan generalisasi dari suatu fenomena yang ada yang diteiti (Hikmawan, 2017a).

Berikut pendekatan penelitian yang peneliti gunakan banyak macamnya, dengan teknik pengumpulan data yang dimana dari data yang didapatkan baik data sekunder maupun primer. Data primer dari hasil pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data sekunder yang diambil dari literature yang ada dengan cara mengumpulkan segala macam narasumber data tertulis yang ada baik dari buku maupun jurnal online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kota Cilegon sendiri menghasilkan sampah plastik 120 ton setiap harinya. Dengan jumlah plastik sebesar itu sehingga diambil langkah pemberian harga pada kantong plastik, walaupun kantong plastik hanya sebagian kecil dari barang-barang berbahan plastik lainnya.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Cilegon dalam meminimalisir sampah, khususnya plastik dengan menerapkan kebijakan tentang UU Pemda No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan masyarakat sekitar Cilegon, masyarakat masih tidak keberatan

dalam penetapan kebijakan kantong plastik sejak pertama diterapkan pada awal 2018. Karena dalam kebijakan plastik berbayar tersebut sebesar Rp.200,- saja dalam jumlah 1 (satu) plastik saja. Pada umumnya masyarakat Kota Cilegon masih menggunakan langkah-langkah biasa dalam pengelola sampah. Seperti membuang sampah pada tempatnya atau bahkan bukan di tempatnya. Walau sekarang sudah banyak masyarakat yang tergerak untuk melakukan daur ulang, dan menggunakan bahan-bahan yang bias kembali dipakai.

Dalam pengelolaan sampah yang digunakan masyarakat Cilegon khususnya sampah rumah tangga dan sampah plastik, mereka hanya membakarnya di pekarangan rumah atau mencari tanah lapang. Peneliti beberapa waktu kemarin sempat melihat situasi dan kondisi lingkungan di Kota Cilegon. Beberapa gundukan sampah terlihat disisi jalan yang mengeluarkan aroma kurang mengenakkan dan menyebabkan beberapa pencemaran seperti udara, air karena beberapa terletak di dekat perairan. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat menyebabkan rusaknya estetika atau keindahan perairan juga Kota.

Data awal yang peneliti temui dengan mewawancarai masyarakat sekitar Kota Cilegon, memang kebijakan plastik berbayar tidak memberikan efek besar pada penggunaan plastik di Kota Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon jarang menggunakan tas belanja, yang sudah tersedia di minimarket hingga supermarket di kawasan Kota Cilegon. Masyarakat lebih memilih untuk tetap menggunakan kantong plastik dengan alasan untuk buang sampah atau lupa membawa tas belanja.

Beberapa mengatakan bahwa *“pakai tas belanja itu ribet, kita*

yang belanjanya pakai motor kalo pakai tas belanja muatannya sedikit dan ujung-ujungnya disuruh pakai plastik” dengan demikian mereka jauh memilih tetap menggunakan kantong plastik yang tidak ruwet. Ketetapan harga per-plastik juga tidak membuat masyarakat keberatan. Karena dengan harga Rp200,- masih terbilang murah dan terjangkau menurut masyarakat Kota Cilegon, sehingga masyarakat yang pergi ke supermarket masih menggunakan kantong plastik.

Dikarenakan data yang masih terbilang belum cukup, maka kami melakukan wawancara. Dilanjut dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang mudah mereka pahami. Pertanyaan-pertanyaan terkait sampah plastik dan kantong plastik.

Pertama, mengenai keefektifan kebijakan plastik berbayar terhadap pengurangan jumlah sampah plastik di Cilegon; para narasumber memberikan penjelasan kepada peneliti; bahwasannya kebijakan plastik sebesar Rp.200,- tidak akan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik di Cilegon, kecuali pemerintah menerapkan apabila menggunakan plastik berbayar dikenakan tarif per plastik sebesar Rp.20.000,-. Yang menarik dari jawaban salah satu narasumber kami ialah

“karena masih terjangkaunya tarif plastik, dan biasanya yang mengunjungi minimarket atau supermarket dan masih menggunakan plastik ialah orang yang memiliki ekonomi menengah keatas, karena yang memiliki ekonomi menengah ke bawah biasanya akan mengunjungi pasar tradisional atau toko-toko kelontong yang ada dipinggir jalan,

jadi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas akan tetap membeli kantong plastiknya”

dengan demikian dapat diumpamakan seperti ini apabila membeli 10 produk yang menghabiskan sekitar Rp 100.000,- lalu menggunakan kantong plastik dengan membayar sebesar Rp.200,- tidak begitu berdampak besar pada harga yang harus dibayarkan ketika berbelanja. Terlihat bahwa kebijakan ini memiliki kelemahan yang cukup besar yaitu tidak menjangkau berbagai kalangan masyarakat Cilegon, yang berarti kebijakan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang pergi ke pasar tradisional karena memang di pasar tradisional tidak diberlakukan kebijakan tersebut.

Kedua, pemakaian shopping bag dalam berbelanja. Penggunaan shopping merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah juga minimarket ataupun supermarket guna mengurangi pemakaian kantong plastik saat berbelanja. Mengingat shopping bag menggunakan bahan tahan lama, tidak mudah sobek, dan adapun yang tahan dengan air. Hal ini menyebabkan shopping bag dapat digunakan berkali-kali hingga beratus-ratus kali. kebanyakan narasumber yang kami wawancarai masih terbilang jarang dalam menggunakan shopping bag. Hal yang peneliti simpulkan dari jawaban mereka, terlihat memang porsi shopping bag memang besar dan muat hingga puluhan makanan atau barang ukuran medium yang tidak efisien jika hanya berbelanja dengan jumlah sedang atau sedikit. Hal lainnya yang mempengaruhi hal ini yaitu habit. Masyarakat yang lupa, malas, dan lainnya tidak terbiasa untuk membawa shopping bag, karena memang tidak dibiasakan untuk membawa shopping bag setiap kali pergi untuk

berbelanja. Salah satu narasumber kami memberikan alasan yang berbeda dari yang lain yaitu; *“saya tidak menggunakan kantong plastik saat belanja bulanan di supermarket, namun saya jauh lebih prefer menggunakan kardus, karena gratis”*. Dengan demikian membuat shopping bag kurang praktis dan kurang efisien, ketika ingin dibawa berbelanja. Serta alasan yang lainnya ialah kebijakan pemerintah tersebut yang menerapkan hanya Rp.200,- per plastik. Kemudian dapat menjadi solusi juga dalam pemanfaatan kardus-kardus bekas stok barang-barang, karena penggunaan kardus juga tidak dipungut biaya sepesrpun, dan dapat mengurangi limbah plastik yang sulit terurai.

Ketiga, mengenai lingkungan tempat tinggal narasumber. Kebanyakan jawaban narasumber yang peneliti wawancara, memberi tahu bahwa lingkungan mereka masih terbilang banyak sekali sampah plastik yang berserakan di pinggir jalan mapun ditempat-tempat yang tidak seharusnya. Beberapa warga sekitar memang sadar terhadap tumpukan sampah-sampah tersebut. Namun kesadaran akan akibat dari timbunan sampahnya masih kurang, dari banyak sampah-sampah yang berserakan terutama sampah plastik. Rata-rata masyarakat yang membuang sampah menggunakan kantong plastik dengan berbagai ukuran sehingga terlihat banyaknya tumpukan sampah plastik dan kantong plastik.

Melihat kesadaran masyarakat Kota Cilegon masih terbilang kurang memiliki kesadaran penuh akan dampak yang dihasilkan oleh Plastik tersebut. Gundukan-gundukan sampah yang peneliti lihat dikerjakan oleh beberapa orang, dengan kapasitas sampah yang sangat banyak. Terlihat sampah-sampah tersebut terdapat banyak sampah plastik, dari

katong plastik, bungkus produk seperti indomie, minuman kemasan, juga detergent. Terlihat bahwa kepedulian sampah masih minim dilakukan.

Menurut data yang disajikan oleh *International Coastal Cleanup Report*, didunia ini memang sampah terbanyak ada pada seluruh penjuru dunia adalah sampah plastik mulai dari; Bungkus makanan, tutup botol plastik, botol plastik, tas belanja plastik, sedotan dan pengaduk plastik beserta kemasan-kemasan plastik dengan jumlah keseluruhan mencapai (808.402) ton, (Qodriyatun,2018).

Kebijakan pusat yang menggunakan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR), berdasarkan kebijakan yang tercantum pada undang-undang No 18 Tahun 2008, Pasal 5 mengenai pengelolaan sampah. Mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan maksud dan tujuan melindungi lingkungan dari siklus terbentuknya produk dan menegaskan kepada produsen untuk mengawasi siklus terbentuknya produk dan dihimbau untuk mengambil kembali hasil produknya untuk kembali memusnahkannya (Lindhqvist dalam Irawan & Chaerul, 2011).

Jumlah produksi sampah pada tahun-tahun sebelum 2018 sekitar 120 ton adalah jumlah yang terbilang tidak sedikit, sehingga kebijakan yang dibuat merupakan langkah kecil yang baik, tetapi melihat dari sampah-sampah plastik yang berserakan juga sampah yang sudah berada di TPS maupun TPA tidak begitu terlihat signifikan berkurang, karena masih ada masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik, bahkan ada penjual kantong plastik diemperan yang dapat menambah jumlah produksi kantong plastik.

Memang sepertinya plastik sangat efisien, dan jauh lebih praktis serta cepat tanggap untuk menaruh barang-barang belanjaan dalam plastik. Namun dampak yang diakibatkan dengan penggunaan plastik tidak dapat dipungkiri menyebabkan, serta mempengaruhi semua hal yang ada di bumi ini. Hingga pada hewan laut sekalipun, pertumbuhan tumbuhanpun demikian.

Melihat pernyataan narasumber sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup yang layak, sehat, dan hasil data produksi sampah pada Tahun ke Tahun tidak berkurang dengan hasil yang masih terbilang tidak sedikit, seharusnya pemerintah baik pusat ataupun daerah dapat menerapkan pembelajaran mengenai “peduli lingkungan” sejak dini (Hikmawan, Indriyany, & Mayrudin, 2019).

Menurut peneliti penerapan pendidikan mengenai “peduli lingkungan” hanya terdapat pada sekolah-sekolah alam yang hanya di berbagai wilayah di Indonesia saja, tidak merata. Sekolah-sekolah umum lainnya juga seharusnya menerapkan pendidikan “peduli lingkungan”, karena piket yang biasa diterapkan di sekolah-sekolah menurut peneliti tidak efektif. Dilihat dari pengalaman peneliti yang menganggap hal tersebut tidak efektif ialah, anak-anak masih bisa berbohong, dan bisa menyuruh temannya saja. Tidak tumbuhnya niat dari dalam diri mereka sendiri.

Dengan penerapan pendidikan “peduli lingkungan” yang dapat dibantu oleh para penggerak sosial dibidang lingkungan (Hikmawan et al., 2019), seperti komunitas green peace, bye-bye plastik, dan lain sebagainya akan menjadi salah satu solusi atau terobosan baru pemerintah dalam menumbuhkan

kepedulian anak bangsa terhadap lingkungan. Dilakukannya pula pemerataan pendidikan tersebut kepada seluruh cakupan pendidikan, mulai dari paud, taman kanak-kanak hingga sekolah kejuruan atau universitas. Karena lingkungan yang bersih merupakan salah satu hal yang disukai oleh sang pencipta.

Jantung bumi ada di wilayah asia yang sekarang populasinya menurun akibat terjadinya penebangan berlebih dan tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Fungsi yang dimiliki hutan juga sangat berpengaruh besar pada alam, begitu pun dengan penggunaan atau pemanfaatan plastik yang melewati ambang batasnya. Akan berdampak besar pada kerusakan bumi, manusia dan ekosistemnya.

KESIMPULAN

Sampah plastik yang ada di Kota Cilegon menumpuk banyak. Permasalahan yang krusial di Kota Cilegon ini terbilang masih susah dalam hal kedisiplinan warga Kota Cilegon yang masih tidak disiplin akan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota setempat. Himbauan sudah dilakukan oleh pemerintah beserta dinas terkait, namun tersendat dengan respon masyarakat yang masih susah dalam hal mengurangi sampah plastik.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang diatur dalam Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 5 pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Penguraian yang sulit dalam sampah plastik ini, cukup membuat pemerintah setempat tersendat ditengah jalan, kendala biaya yang terjadi menjadi

salah satu permasalahan juga, kemudian alat-alat untuk mengelola sampah yang masih terbilang cukup susah dicari dan sangat mahal, masih membuat pemerintah memikirkan dua kali untuk membeli barang tersebut.

Sampah plastik pada awal tahun 2018 hingga 2019 ini terus meningkat. Pola konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Cilegon masih belum bisa diubah dalam penggunaan sampah plastik. Rasa kepedulian terhadap lingkunganpun masih terbilang cukup minim. Kesadaran akan pembuangan sampah pun Masyarakat Cilegon masih harus diperbaiki.

Wawancara yang dilakukan peneliti oleh masyarakat, jawaban-jawaban yang mereka lontarkan dapat peneliti simpulkan bahwa, masyarakat masih enggan menggunakan *totebag* pengganti plastik saat berbelanja dengan alasan, apabila *totebag*-nya tidak muat dan kurang dalam menampung belanjaan mereka, mereka tetap disarankan untuk menggunakan plastik. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Cilegon dalam UU No.18 Tahun 2008 pasal 5, masih belum efektif diimplementasikan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Mengapa masih belum efektif, itu karena ternyata kebijakan ini masih terbilang lemah. Hal ini karena target dari kebijakan ini tidak meluas atau tidak merata. Menarik dari hasil wawancara kami kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang pergi ke minimarket ataupun supermarket yang biasanya memiliki kondisi ekonomi yang cukup atau menengah ke atas, lalu bagaimana dengan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Masyarakat menengah ke bawah lebih memiliki untuk pergi ke pasar tradisional yang dimana pasar tradisional tidak memberlakukan kebijakan ini karena memang bukan ditargetkan untuk pasar tradisional. Ini menyebabkan masyarakat yang pergi ke pasar tradisional masih menggunakan kantong plastik yang bisa mereka dapatkan dan gunakan dengan gratis. Hal ini tentu akan terus menambah jumlah sampah plastik di Kota Cilegon mengingat masyarakat yang pergi ke pasar tradisional tidaklah sedikit.

Adapun faktor kesadaran. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang minim, walaupun ada masyarakat yang peduli dan paham soal lingkungan tetapi hal ini tidak sebanding dengan masyarakat yang masih belum paham dan peduli dengan lingkungan. Masih banyaknya masyarakat yang masih belum peduli dan paham terhadap lingkungan.

Dampak apa yang akan ditimbulkan jika lingkungan tercemar, dampak apa jika lingkungan rusak. Hal-hal tersebut masih belum dipahami oleh masyarakat Kota Cilegon melihat keadaan sampah dan sampah plastik yang berserakan di sudut-sudut Kota. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik masih sangat minim.

Bagi mereka sampah kantong plastik tidak terlalu berdampak bagi lingkungan terlihat dari masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik atau bahan plastik lainnya secara berlebihan. Hal ini juga menjadi faktor mengapa kebijakan plastik berbayar ini belum berhasil.

Masyarakat mengaku bahwa jumlah sampah dan sampah plastik baik dipinggir jalan juga tempat lainnya dan di tempat pembuangan sampah (TPS) masih

terlihat tumpukan sampah dengan jumlah yang tidak sedikit dengan kata lain sangat banyak. Mengingat jumlah penduduk di Cilegon bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu menurut kami kebijakan plastik berbayar yang diberlakukan di Kota Cilegon oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang disalurkan ke Pemerintah Daerah lalu diberlakukan pada Kota-Kota sebagai percobaan di Kota Cilegon, nyatanya tidak berhasil mengurangi jumlah sampah plastik di Kota Cilegon. Sehingga hal ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi lainnya terkait penanggulangan sampah plastik di Indonesia maupun di Kota Cilegon. Melihat dari kebijakan ini belum juga menemukan keberhasilannya. Salah satu solusi yang dapat kami tawarkan yaitu edukasi tentang peduli lingkungan.

Masyarakat yang semakin tereduksi akan semakin paham dan peduli terhadap lingkungan, bukan hanya anak-anak tetapi orang dewasa hingga ke setiap kalangan akan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan. Sehingga mereka memiliki kesadaran yang menghasilkan habit terhadap sampah juga penggunaan plastik terutama kantong plastik.

suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf (diakses pada 14/03/2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Alvionita Rizqi. (2019). Pengaruh Kesadaran Lingkungan Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Kelurahan Pondok Labu. Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN JKT.
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88–98.
- Hikmawan, M. D. (2020). *Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net* (Vol. 11). Retrieved from www.ijicc.net
- Hikmawan, M. D., Indriyany, I. A., & Mayrudin, Y. M. (2019). Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.57>
- Karuniastuti, Nurhenu. Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Forum Teknologi*, Vol. 3, No.1.
- Landasan Teori Bab II. Yang diakses pada [http://repository.uin-](http://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf)
- Lusnita, Natalia. 2019. Program Pengurangan Sampah Plastik Melalui Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Ritel Modern. *Journal of Servite, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, Jakarta, Indonesia*.
- Novianti, Ayi Indah,. Kartika, Lindawati. (2017). Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1,(81 – 94)*.
- Octavianti, Meria., Koswara, Iwan., Sari, Dhisa Y.A. (2016). Karakteristik Inovasi Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis Bagi Ibu Rumah Tangga Di Kota Bandung. *Jurnal Komunikasi Vol. 8, No. 2, (134 – 146)*.
- Purwaningrum, Pramiati. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan. *Vo.8, No.2*.
- Qudriyatun, Sri Nurhayati. (2018). Sampah Plastik; Dampak Terhadap Pariwisata Dan Solusi. *Vol. X, No.23*.
- Rahayuningsih, Yunia. (2018). Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Ssampah Berbasis Masyarakat Di Kota Cilegon. *Bappeda Provinsi Banten KP3B, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten*.
- Rena, Mayang. *Pengelolaan Sampah. Kajian Teori Bab II. Yang di akses pada https://www.academia.edu/8648501/PENGOLAHAN_SAMPAH (diakses pada 14/03/2020)*.

Sujaryanto. (2014). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Candi Muaratakus Sebagai Objek Pariwisata Di Kabupaten Kampar. Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau.

Wahyudi, Jatmiko,. Prayitno, Hermai Teguh., Astuti, A D. (2018). Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif. Jurnal Litbang Vol. XIV,(58-67).

Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 95–115.